



JCC Gagal Bayar Rp2,5 M per Tahun Sejak 2020

Zayadi: Investor Harus Tuntaskan Kewajiban BOT

JAMBI - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Zayadi, kembali menyoroti persoalan mangkraknya pembangunan pusat perbelanjaan Jambi City Center (JCC) di kawasan eks Terminal Simpang Kawat. ■

— baca JCC hal 5



JCC

— dari hal 3

Menurutnya, proyek yang dijalankan oleh PT Bliss Properti Indonesia melalui skema Build Operate Transfer (BOT) sejak tahun 2014 itu kini mengalami banyak pelanggaran kesepakatan, terutama soal kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Kota Jambi.

Zayadi mengungkapkan, jauh sebelum proyek ini berjalan, DPRD telah memberikan masukan agar aset eks terminal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Flashback ke 2013, kami sudah beri saran. Kami memang tidak setuju aset itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, karena lebih baik dikembalikan ke fungsi semula, seperti terminal yang bisa bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (7/5/2025).

Ia mengatakan, perjanjian

BOT yang diteken sejak 2014 terdiri dari tiga termin untuk jangka waktu 30 tahun. Termin pertama telah dijalankan, namun pada termin kedua, pihak PT Bliss Properti Indonesia disebutkan mulai macet dalam pembayaran.

“Harusnya sejak 2020, mereka membayar Rp2,5 miliar per tahun, tapi sampai sekarang belum ada lagi pembayaran. JCC terbengkalai, itu yang kita lihat sekarang,” tegas Zayadi.

Zayadi juga menanggapi informasi bahwa pihak JCC kini berencana mengajukan nota kesepahaman (MoU) baru kepada Pemkot Jambi. Menurutnya, Pemkot harus bersikap tegas dan mendesak penyelesaian kewajiban pada perjanjian lama terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kerja sama baru.

“Jangan sampai ada MoU baru sebelum yang

lama dituntaskan. Ada konsekuensi hukum di sana. OPD terkait harus betul-betul mengkaji apakah usulan baru itu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Pemkot Jambi pada 2014 membuat perjanjian BOT dengan PT Bliss Properti Indonesia untuk memanfaatkan lahan eks Terminal Simpang Kawat sebagai pusat perbelanjaan dan hotel. Skema BOT memungkinkan investor membangun dan mengelola aset untuk jangka waktu tertentu, sebelum diserahkan kembali ke pemerintah.

Hingga kini, bangunan JCC tampak terbengkalai dan belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. DPRD berharap Pemkot bersikap tegas agar aset daerah ini tidak terus-menerus terbengkalai dan merugikan kepentingan publik. (alf)